



Parenting Berbasis Hak Anak: Integrasi Kebijakan Global dalam Pendidikan dan Pengasuhan

Hamid Patilima

Universitas Panca Sakti Bekasi, Indonesia

DOI: [10.31004/obsesi.v9i1.6870](https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i1.6870)

Abstrak

Kebijakan parenting berbasis hak anak meningkatkan kesejahteraan anak, tetapi implementasinya menghadapi tantangan regulasi dan budaya. Penelitian ini mengidentifikasi kebijakan parenting berbasis hak anak di berbagai negara serta faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan *Systematic Literature Review* (SLR) dan metode PRISMA 2020 untuk menganalisis kebijakan. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah dan publikasi akademik. Negara dengan kebijakan kuat mendukung keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Negara Nordik menerapkan parental leave yang panjang, sedangkan Kanada dan Australia mengembangkan kebijakan berbasis komunitas. Indonesia dan Malaysia menghadapi hambatan sosial dan budaya dalam implementasi. Penelitian ini berdampak pada kebijakan pendidikan, pengasuhan, dan riset akademik. Pemerintah perlu memperkuat regulasi parental leave dan mengintegrasikan parenting berbasis hak anak. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk menilai efektivitas kebijakan ini di berbagai konteks sosial budaya. Keberhasilan kebijakan bergantung pada regulasi dan adaptasi budaya. Kolaborasi antara akademisi, pembuat kebijakan, dan komunitas sangat diperlukan guna memastikan efektivitasnya dalam mendukung kesejahteraan dan pendidikan anak.

Kata Kunci: *Parenting Berbasis Hak Anak; Kebijakan Pendidikan; PRISMA 2020; Cuti Orang Tua.*

Abstract

Children's rights-based parenting enhances child welfare but faces challenges in regulation and cultural adaptation. This study analyzes children's rights-based parenting policies in various countries and their success factors. This research applies Systematic Literature Review (SLR) using PRISMA 2020 to examine relevant policies. Data were collected from scientific journals and academic publications. Countries with strong policies support parental involvement in education. Nordic countries implement extended parental leave, while Canada and Australia develop community-based policies. Indonesia and Malaysia face social and cultural barriers in implementation. This study impacts education policy, parenting, and academic research. Governments should enhance parental leave policies and integrate children's rights-based parenting principles into educational curricula. Further studies are needed to assess the effectiveness of these policies in various socio-cultural contexts. Policy success relies on regulation and cultural adaptation. Collaboration between academics, policymakers, and communities is essential to ensuring effectiveness in promoting child welfare and education.

Keywords: *Children's Rights-Based Parenting; Education Policy; PRISMA 2020; Parental Leave.*

Copyright (c) 2025 Hamid Patilima

✉ Corresponding author:

Email Address: hamidpatilima29773@gmail.com (Bekasi, Indonesia)

Received 2 January 2025, Accepted 10 February 2025, Published 19 February 2025

Pendahuluan

Pendekatan pengasuhan yang berorientasi pada hak anak telah mendapatkan perhatian global dalam kebijakan pendidikan di berbagai negara. Konsep ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak memperoleh perlindungan, dukungan, dan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal mereka. Penelitian yang dilakukan oleh UNICEF (2024a) dan OECD (2020) menunjukkan bahwa negara yang menerapkan kebijakan pengasuhan berbasis hak anak dalam sistem pendidikan mengalami peningkatan kesejahteraan anak yang signifikan, dengan perbedaan mencapai 16% dibandingkan negara yang belum menerapkannya (Altafim dkk., 2018; Bornstein & Bradley, 2014). Bukti ini menguatkan bahwa kebijakan pengasuhan berbasis hak anak tidak hanya berdampak pada perkembangan sosial dan emosional anak, tetapi juga pada kualitas pendidikan yang mereka terima.

Namun, meskipun bukti empiris mendukung keberhasilan kebijakan ini, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Kendala regulasi, resistensi budaya, serta ketidaksesuaian antara kebijakan dan konteks lokal menjadi isu utama yang menghalangi pelaksanaan yang efektif di beberapa negara (Byrne & Lundy, 2019; Eklund & Lundqvist, 2021). Sebagai contoh, kebijakan *tiger parenting* yang dianut di beberapa negara Asia menunjukkan bagaimana nilai budaya terkait pengasuhan dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip pengasuhan berbasis hak anak yang inklusif (Kobakhidze dkk., 2024; Tello dkk., 2024; Teuber dkk., 2024; Zhang, 2020). Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa pengasuhan berbasis hak anak memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya yang ada.

Seiring dengan itu, Heckman (2006) dan Shonkoff & Phillips (2000) mengungkapkan bahwa investasi dalam pengasuhan anak usia dini yang mendukung hak-hak anak tidak hanya meningkatkan kesejahteraan langsung anak-anak, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperkuat sistem pendidikan secara keseluruhan. Studi terbaru oleh Esping-Andersen (2021) juga menekankan pentingnya kebijakan keluarga yang adaptif untuk mendukung pengasuhan yang berorientasi pada hak anak dalam sistem pendidikan. Belsky (1984) dan Bronfenbrenner (1979) berpendapat bahwa faktor-faktor sosial dan lingkungan mempengaruhi pola pengasuhan dan perkembangan anak. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan berbasis hak anak yang dapat mengintegrasikan berbagai faktor sosial dan budaya dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara optimal.

Studi kasus dari negara-negara seperti Swedia dan Finlandia, yang telah berhasil mengintegrasikan kebijakan pengasuhan berbasis hak anak dalam sistem pendidikan mereka, memberikan contoh ideal mengenai bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif. Model kebijakan di negara-negara ini tidak hanya memperkuat hak-hak anak tetapi juga meningkatkan kesetaraan gender serta keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak mereka (OECD, 2020). Tobin (2019) menekankan bahwa penerapan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai landasan kebijakan pendidikan dan pengasuhan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara menyeluruh dalam setiap kebijakan. Penguatan implementasi KHA ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendidikan yang masih terjadi, terutama di negara-negara berkembang yang sering menghadapi tantangan terkait keterbatasan sumber daya dan perbedaan budaya.

Gap Penelitian & Masalah yang Dihadapi

Meskipun urgensi parenting berbasis hak anak semakin meningkat dalam kebijakan global, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi dan efektivitasnya di berbagai negara. Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji peran hak anak dalam sistem pendidikan dan praktik pengasuhan, masih terdapat kekurangan dalam penelitian yang secara spesifik membahas efektivitas kebijakan parenting berbasis hak anak dalam konteks pendidikan di berbagai negara. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam

mengenai bagaimana regulasi di tiap negara dapat memperkuat pengasuhan berbasis hak anak secara berkelanjutan dan inklusif.

Connolly & Devaney (2018) mengidentifikasi bahwa fokus utama dalam penelitian sebelumnya adalah pada pengasuhan di tingkat keluarga, tanpa mempertimbangkan bagaimana kebijakan negara dapat berperan dalam mendukung implementasi pengasuhan berbasis hak anak. Sementara itu, Byrne & Lundy (2019) menyoroti pentingnya hak anak dalam pendidikan, namun tidak membahas secara spesifik bagaimana kebijakan nasional dapat memfasilitasi pengasuhan berbasis hak anak dalam sistem pendidikan yang berkelanjutan. Studi terbaru oleh Salminen (2017) dan Salonen & Kolvisto (2024) juga menyoroti bagaimana kebijakan pendidikan inklusif di Eropa telah mengarah pada praktik pengasuhan yang lebih berbasis hak anak, tetapi belum sepenuhnya diadopsi di berbagai negara berkembang. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis implementasi kebijakan parenting berbasis hak anak secara komparatif di berbagai negara, serta menawarkan rekomendasi berbasis bukti yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana berbagai negara mengadopsi kebijakan parenting berbasis hak anak dalam sistem pendidikan mereka melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Mengidentifikasi hambatan utama dalam implementasi kebijakan tersebut, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan regulasi. Menyediakan rekomendasi berbasis bukti guna meningkatkan efektivitas kebijakan parenting berbasis hak anak, dengan menekankan pentingnya integrasi dalam sistem pendidikan formal dan nonformal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkaya wawasan akademik dan praktik pengasuhan, serta memperkuat integrasi hak anak dalam kebijakan pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan, dalam merancang regulasi yang lebih mendukung pendekatan parenting berbasis hak anak, pendidik dan akademisi, dalam mengembangkan model pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak, orang tua dan praktisi parenting, dalam menerapkan metode pengasuhan yang lebih inklusif dan berbasis hak anak, dan organisasi internasional, seperti UNICEF dan OECD, dalam mendukung upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama dalam aspek pendidikan berkualitas dan perlindungan anak.

Parenting berbasis hak anak adalah model pengasuhan yang menempatkan hak anak sebagai prinsip utama dalam kebijakan dan praktik pengasuhan. Model ini berakar pada Konvensi Hak Anak (KHA) yang disahkan oleh PBB pada tahun 1989, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, pendidikan yang berkualitas, dan kesejahteraan yang optimal (Lansdown, 2012; Save the Children, 2023b; UNICEF, 2024b). Pengasuhan berbasis hak anak mengakui bahwa anak-anak bukan hanya objek perlindungan, tetapi subjek hak yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, baik dalam konteks pendidikan maupun keluarga.

Beberapa negara, seperti Swedia dan Finlandia, telah berhasil mengintegrasikan hak anak dalam kebijakan pendidikan mereka, menjadikan pendidikan berbasis hak anak bagian integral dari kurikulum pendidikan dasar mereka dan memberikan kebijakan seperti parental leave yang mendukung keterlibatan orang tua dalam pengasuhan. Dengan demikian, hak anak tidak hanya dipenuhi dalam keluarga, tetapi juga melalui sistem pendidikan formal yang mendukung perkembangan anak secara holistik (OECD, 2023; Salminen, 2017; Salonen & Koivisto, 2024).

Parenting berbasis hak anak memiliki landasan yang kuat dalam berbagai teori pengasuhan yang mengedepankan keterlibatan orang tua dan hak partisipasi anak dalam proses pengasuhan dan pendidikan mereka. Teori Attachment menggarisbawahi pentingnya hubungan yang aman antara anak dan pengasuh dalam membentuk kepercayaan diri dan kemampuan sosial anak. Bowlby (1979) menyatakan bahwa ikatan emosional yang kuat antara anak dan orang tua adalah dasar bagi perkembangan sosial-emosional anak.

Implikasi dalam Kebijakan seperti parental leave di Swedia memberikan orang tua kesempatan untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan anak mereka, memperkuat ikatan emosional sejak usia dini (OECD, 2023; Salminen, 2017; Salonen & Koivisto, 2024; Van IJzendoorn dkk., 2020).

Selanjutnya Teori Pengasuhan Demokratis (Baumrind, 1967), teori ini menekankan bahwa pengasuhan yang melibatkan kontrol wajar dan kebebasan yang sesuai memberikan anak kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi mereka (Baumrind & Black, 1967). Implikasi dalam Kebijakan: Negara seperti Finlandia dan Belanda menekankan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan pendidikan mereka, memperkuat prinsip hak anak untuk didengar (Eklund & Lundqvist, 2021; Lundy, 2007).

Berikutnya Teori Pengasuhan Responsif (Bornstein & Bradley, 2014). Teori ini menekankan pentingnya orang tua yang peka terhadap kebutuhan emosional, sosial, dan fisik anak. Implikasi dalam Kebijakan: Parental leave memungkinkan orang tua lebih responsif terhadap kebutuhan anak, sesuai dengan hak anak untuk didengarkan (Esping-Andersen, 2021; Save the Children, 2023b).

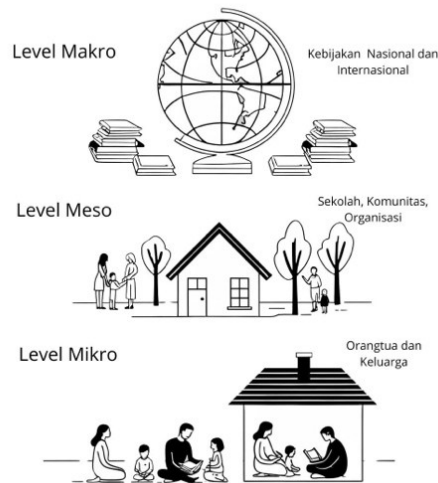
Berikutnya Teori Hak Anak (Freeman, 1997). Teori ini menyatakan bahwa anak adalah subjek hak yang berhak berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan mereka, termasuk pendidikan dan pengasuhan (Freeman & Saunders, 2014). Implikasi dalam Kebijakan: Negara seperti Belanda dan Selandia Baru memastikan bahwa anak tidak hanya dilindungi, tetapi juga memiliki suara dalam keputusan pendidikan mereka (Pillay, 2018; Riádigos-Couso dkk., 2025; Salminen, 2017; Salonen & Koivisto, 2024; Tobin, 2019).

Selanjutnya Teori Ekologi (Bronfenbrenner, 1979). Teori ini menyatakan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi berbagai lapisan lingkungan sosial, mulai dari keluarga hingga kebijakan sosial nasional (Bronfenbrenner, 1979). Implikasi dalam Kebijakan: Kebijakan parental leave di Finlandia dan Kanada memperlihatkan bagaimana kebijakan makrosistem dapat memperkuat pengasuhan di tingkat keluarga dan komunitas (OECD, 2023; Salminen, 2017; Salonen & Koivisto, 2024).

Berikutnya Teori Cultural Lag (Ogburn, 1964). Teori ini menyatakan bahwa meskipun kebijakan sosial dan pendidikan berkembang, perubahan norma sosial dan budaya sering tertinggal (Ogburn & Thomas, 1922). Implikasi dalam Kebijakan: Negara-negara berkembang sering menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis hak anak karena ketertinggalan budaya (Armstrong & Tan, 1978; Esping-Andersen, 2021; Kumar, 2023; Lee & Chen, 2018; Liu & Wang, 2024).

Pendekatan multi-level governance dalam parenting berbasis hak anak memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap keterkaitan antara kebijakan nasional, implementasi komunitas, dan dampaknya terhadap keluarga. Dalam model ini, terdapat tiga level utama yang saling berinteraksi: 1) Level Mikro (Keluarga): orang tua sebagai aktor utama dalam implementasi parenting berbasis hak anak, dan program seperti Home Learning Environment di Inggris memberikan pelatihan bagi orang tua agar mampu mendukung perkembangan anak sesuai dengan prinsip hak anak (Sylva dkk., 2011). 2) Level Meso (Sekolah dan Komunitas): sekolah dan komunitas berperan sebagai mediator dalam mendukung pengasuhan berbasis hak anak, dan program Strong Start di Kanada menunjukkan bagaimana sekolah dapat berkolaborasi dengan komunitas untuk memberikan dukungan pada keluarga berpenghasilan rendah dalam menerapkan pengasuhan berbasis hak anak (Connolly & Devaney, 2018; OECD, 2023). 3) Level Makro (Kebijakan Nasional dan Internasional): kebijakan parental leave di negara-negara Nordik memungkinkan orang tua memiliki waktu lebih lama dalam merawat dan mendidik anak sejak usia dini, yang mendukung implementasi pengasuhan berbasis hak anak (Salminen, 2017; Salonen & Koivisto, 2024), dan kebijakan berbasis hak anak di Belanda menekankan peran aktif anak dalam sistem pendidikan mereka, memberikan hak suara dalam pengambilan keputusan akademik yang memengaruhi masa depan mereka (Lundy, 2007; Tobin, 2019).

Untuk memperjelas interaksi antar level ini, model konseptual dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram piramida atau diagram alir, yang menggambarkan bagaimana kebijakan dari level makro diterapkan dalam komunitas dan keluarga.



Gambar 1. Model Kerangka Konseptual Parenting Berbasis Hak Anak

Dengan pendekatan ini, integrasi kebijakan parenting berbasis hak anak dapat lebih efektif karena memperhitungkan keterlibatan berbagai aktor di setiap level sosial. Hal ini juga memungkinkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap konteks budaya dan sosial di setiap negara.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), yang memungkinkan pengumpulan, evaluasi, dan sintesis literatur secara sistematis dan transparan. Metode ini sangat cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan kebijakan sosial dan pendidikan, terutama terkait dengan parenting berbasis hak anak (Moher dkk., 2009; Page dkk., 2021).

Metode PRISMA dipilih karena telah terbukti lebih unggul dibandingkan narrative review dalam mengurangi bias seleksi dan meningkatkan keterulangan penelitian dalam berbagai disiplin ilmu sosial (Greenhalgh dkk., 2018). Studi oleh Hart & Rodgers (2024) juga menegaskan bahwa pendekatan SLR menghasilkan wawasan yang lebih sistematis dan dapat direplikasi, menjadikannya alat yang efektif dalam studi kebijakan pendidikan.

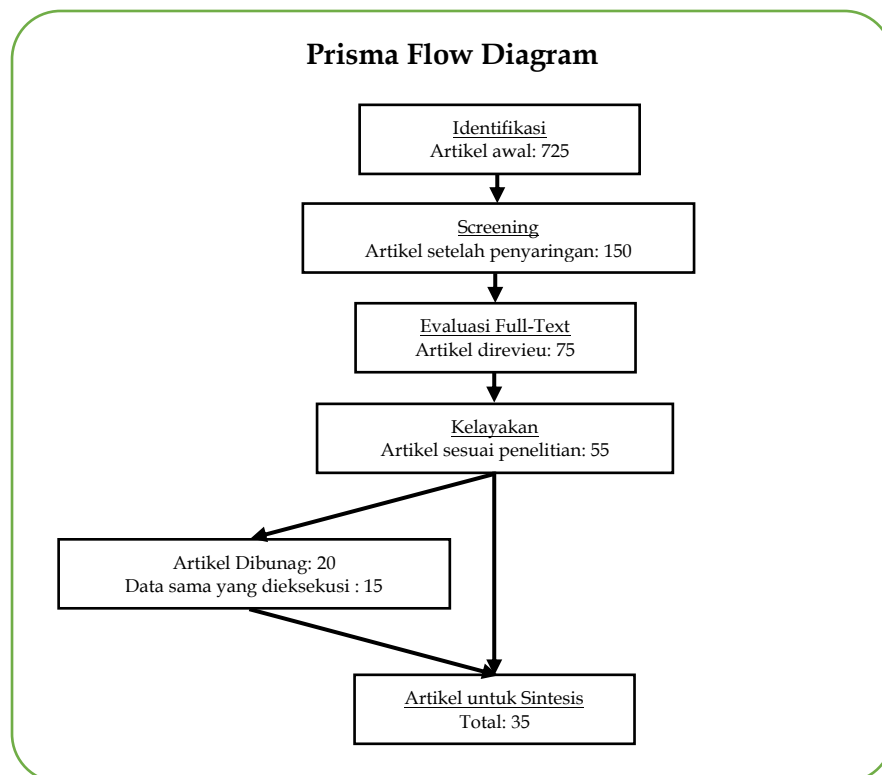
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber akademik yang telah terverifikasi untuk memastikan kualitas dan validitas informasi. Sumber utama yang digunakan meliputi: Scopus: Database jurnal ilmiah dengan sistem peer review yang ketat (Snyder, 2019), Google Scholar: Sumber tambahan untuk memperoleh literatur yang relevan, OECD Library: Laporan kebijakan pendidikan yang berbasis hak anak (OECD, 2020), UNICEF dan WHO Reports: Laporan kebijakan dan data hak anak secara global (UNICEF, 2024b; WHO, 2025), UNESCO & Bank Dunia: Studi kebijakan global tentang hak anak dalam pendidikan (UNESCO, 2023; World Bank, 2024), Jurnal terindeks Q1 dan Q2: Artikel yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi tinggi (Byrne & Lundy, 2019), dan DOI-indexed sources: Artikel dengan DOI untuk memastikan keabsahan akademik (Tobin, 2019).

Kriteria Inklusi meliputi artikel penelitian yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir (2019-2024) untuk memastikan data terkini (Lundy, 2007; Page dkk., 2021; Tobin, 2019), membahas kebijakan parenting berbasis hak anak dalam sistem pendidikan (Tobin, 2019), berasal dari jurnal yang terindeks Scopus, Web of Science (WoS), atau jurnal bereputasi lainnya (Freeman & Saunders, 2014), dapat diakses secara penuh (full-text) untuk dianalisis

lebih lanjut (Hsieh & Shannon, 2005), dan memiliki DOI (Digital Object Identifier) untuk meningkatkan validitas akademik (Greenhalgh dkk., 2018).

Sedangkan Kriteria Eksklusi meliputi publikasi dalam bahasa selain Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesiam, artikel yang hanya membahas parenting berbasis hak anak tanpa kaitan dengan kebijakan pendidikan (Chao, 1994), studi yang bersifat opini atau editorial tanpa data empiris yang dapat dianalisis (Scholes dkk., 2022; Tello dkk., 2024), dan artikel yang tidak memiliki DOI atau sumber referensi yang tidak dapat diverifikasi (Grolnick & Pomerantz, 2009).

Proses seleksi literatur mengikuti standar PRISMA 2020, yang memastikan bahwa artikel yang dimasukkan memenuhi kriteria kualitas tinggi serta meminimalkan potensi bias dalam pemilihan literatur. Visualisasi PRISMA Flow Diagram menggambarkan proses seleksi artikel secara lebih jelas.



Gambar 2. PRISMA Flow Diagram

Seleksi dilakukan dalam empat tahapan utama yaitu; 1) Identifikasi, pencarian artikel dilakukan menggunakan Publish or Perish, dengan kata kunci child rights-based parenting, parenting policies in education, dan children's rights and parenting. Hasil pencarian awal menghasilkan 725 artikel (Soehartono & Kurniawan, 2020). 2) Screening yaitu artikel yang tidak relevan atau duplikasi dieliminasi, 50 artikel disaring lebih lanjut berdasarkan abstrak dan relevansi topik, dari hasil screening, 75 artikel dievaluasi secara full-text untuk memastikan kesesuaian dengan penelitian. 3) Evaluasi Kelayakan (*Eligibility*) yaitu; artikel yang memenuhi syarat kelayakan: 75 artikel, artikel yang benar-benar sesuai dengan fokus penelitian: 55 artikel, artikel yang dibuang karena duplikasi atau kurang relevan: 20 artikel, dan artikel yang memiliki data yang sama dan akhirnya dikeluarkan: 15 artikel. 3) Sintesis yaitu setelah eliminasi akhir, sebanyak 35 artikel digunakan dalam analisis sistematis (Biersteker dkk., 2022; Key, 2015) kemudian artikel ini dikelompokkan berdasarkan kategori tematik dan dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam kebijakan parenting berbasis hak anak.

Data dianalisis menggunakan Content Analysis (Krippendorff, 2019), yang memungkinkan identifikasi pola dan tema utama dalam literatur yang telah disaring. Metode ini dipilih karena lebih fleksibel dibandingkan meta-analysis dalam mengintegrasikan berbagai sumber literatur (Hsieh & Shannon, 2005).

Analisis dilakukan dalam tiga tahap utama yaitu 1) analisis Kebijakan dengan mengidentifikasi tren global dalam kebijakan parenting berbasis hak anak (Lundy, 2007), dan membandingkan perkembangan kebijakan dalam berbagai konteks negara (Cassidy dkk., 2010). 2) Analisis Komparatif dengan membandingkan implementasi kebijakan di berbagai negara, dan mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam kebijakan pengasuhan berbasis hak anak (Eklund & Lundqvist, 2021). 3) Temuan Tematik yaitu mengelompokkan hasil studi berdasarkan tema utama, seperti: Kebijakan partisipasi anak (Connolly & Devaney, 2018), Pendidikan berbasis hak anak (Baumrind & Black, 1967), dan Pengasuhan responsif (Bronfenbrenner, 1979).

Dengan menggunakan Content Analysis, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang implementasi kebijakan parenting berbasis hak anak, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat sistem pengasuhan berbasis hak anak dalam sistem pendidikan.

Hasil Dan Pembahasan

Temuan dari Systematic Literature Review (SLR) Penelitian ini menggunakan metode PRISMA 2020 dan Content Analysis untuk mengidentifikasi tren global dalam kebijakan parenting berbasis hak anak. Analisis ini mencakup perbandingan kebijakan di berbagai negara serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Tren Global dalam Kebijakan Parenting Berbasis Hak Anak

Kebijakan parenting berbasis hak anak telah diterapkan di berbagai negara, terutama yang telah mengadopsi Konvensi Hak Anak (KHA). Negara-negara Nordik, Kanada, dan Australia memiliki kebijakan parental leave berbasis hak anak yang kuat, sementara negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia masih menghadapi hambatan sosial dan budaya dalam implementasinya.

Tabel 1. Perbandingan Kebijakan Parenting Berbasis Hak Anak di Berbagai Negara

Negara	Kebijakan Parenting	Kesejahteraan Anak (%)	Durasi Parental Leave (Hari)	Referensi
Swedia	<i>Parental Leave Act</i> (1995)	85%	480 hari	Esping-Andersen (2021); Heckman (2006)
Finlandia	<i>Finnish Parental Leave Act</i> (1990)	82%	420 hari	Salminen (2017); OECD (2023)
Norwegia	<i>Norwegian Parental Leave Policy</i> (2000)	80%	390 hari	OECD (2023)
Kanada	<i>Family and Child Support Act</i> (2000)	75%	281 hari (40 minggu)	Zaidi dkk. (2021)
Australia	<i>Australian Family Law Act</i> (1975)	70%	126 hari (18 minggu)	Dockery (2022); Taylor (2024); Holloway (2015)
Indonesia	<i>Undang-Undang Perlindungan Anak</i> (2002)	60%	90 hari (3 bulan)	Solin (2022); Unicef (2020)
Malaysia	<i>Undang-Undang Perlindungan Anak</i> (1991)	55%	60 hari (2 bulan)	Awal (2012)

Analisis Perbandingan Kebijakan Parenting di Berbagai Negara

Swedia, Finlandia, dan Norwegia, negara-negara ini memiliki parental leave berbasis hak anak yang kuat, dan kebijakan ini berkontribusi pada kesejahteraan psikososial anak dan pendidikan mereka (Salminen, 2017; Salonen & Koivisto, 2024). Kanada dan Australia, fokus pada keterlibatan orang tua dalam pendidikan dan kebijakan berbasis komunitas, Parental leave meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan anak (Dockery dkk., 2022; MaPa, 2022; McBrien, 2011; Zaidi dkk., 2021). Indonesia dan Malaysia mulai mengadopsi kebijakan parenting berbasis hak anak tetapi masih menghadapi hambatan sosial dan budaya (Awal, 2012; Solin & Ruwaida, 2022; UNICEF, 2020).

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan yaitu regulasi pemerintah: Negara dengan pengawasan ketat memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi (OECD, 2023; Save the Children, 2023b), keterlibatan Komunitas dan Sekolah: Partisipasi komunitas meningkatkan efektivitas kebijakan parenting berbasis hak anak (OECD, 2023), hambatan Sosial dan Budaya: Banyak negara berkembang menghadapi resistensi terhadap konsep parenting berbasis hak anak (Byrne & Lundy, 2019), dan dukungan Ekonomi & Peran Sektor Swasta: Insentif pajak dapat meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam mendukung parental leave (OECD, 2023).

Implikasi terhadap Kebijakan Pendidikan meliputi investasi dalam pelatihan pendidik dan keterlibatan orang tua dapat meningkatkan efektivitas kebijakan parenting berbasis hak anak (OECD, 2023), dan Partisipasi komunitas dalam pendidikan anak dapat meningkatkan kesejahteraan psikososial anak (WHO, 2025).

Penulis memberikan rekomendasi kebijakan dengan memperpanjang parental leave berbasis hak anak agar mencakup lebih banyak dukungan bagi ibu dan ayah, meningkatkan keterlibatan komunitas dan sekolah dalam mendukung kebijakan parenting berbasis hak anak, dan menyusun regulasi yang lebih ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar parenting berbasis hak anak di tingkat nasional dan internasional.

Simpulan

Temuan utama menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebijakan parenting berbasis hak anak yang kuat cenderung memiliki regulasi yang mendukung keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Negara-negara Nordik seperti Swedia, Norwegia, dan Finlandia menerapkan parental leave yang panjang dan berbasis hak anak. Sementara itu, Kanada dan Australia mengembangkan kebijakan pendidikan berbasis hak anak dengan keterlibatan komunitas dan organisasi anak dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia masih menghadapi hambatan sosial dan budaya dalam implementasi kebijakan ini.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa regulasi yang jelas, keterlibatan komunitas dan sekolah, serta kondisi sosial dan budaya merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan kebijakan parenting berbasis hak anak. Negara-negara dengan dukungan kebijakan yang kuat serta keterlibatan aktif komunitas menunjukkan efektivitas lebih tinggi dalam implementasi kebijakan ini (OECD, 2023; Save the Children, 2023b). Kolaborasi antara akademisi, pembuat kebijakan, dan komunitas menjadi kunci dalam penguatan regulasi, pengembangan penelitian berbasis data empiris, serta implementasi strategi yang adaptif terhadap kondisi sosial dan budaya setempat. Penguatan regulasi dan dukungan berbasis data akan memungkinkan kebijakan ini menjadi standar global dalam mendukung kesejahteraan dan pendidikan anak di masa depan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Panca Sakti Bekasi, Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Panca Sakti Bekasi, serta Kepala LPPM Universitas Panca Sakti Bekasi atas dukungan moral dan akademik yang telah diberikan.

Daftar Pustaka

- Altafim, E. R. P., McCoy, D. C., & Linhares, M. B. M. (2018). Relations between parenting practices, socioeconomic status, and child behavior in Brazil. *Children and Youth Services Review*, 89, 93–102. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.04.025>
- Armstrong, H. E., & Tan, E. K. (1978). Body-Image Barrier Perception as a Function of Assimilation within the Malaysian Aborigines. *The Journal of Social Psychology*, 105(2), 165–173. <https://doi.org/10.1080/00224545.1978.9924110>
- Awal, N. A. M. (2012). Malaysia: What lies ahead? Dalam E. E. Sutherland (Ed.), *The Future of Child and Family Law* (1 ed., hlm. 205–234). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139035194.008>
- Baumrind, D., & Black, A. E. (1967). Socialization Practices Associated with Dimensions of Competence in Preschool Boys and Girls. *Child Development*, 38(2), 291. <https://doi.org/10.2307/1127295>
- Belsky, J. (1984). The Determinants of Parenting: A Process Model. *Child Development*, 55(1), 83. <https://doi.org/10.2307/1129836>
- Biersteker, L., Berry, L., & Gwele, M. (2022). In whose best interests? The ECD regulatory framework, understandings of the best interests of the young child and access to quality early education. *South African Journal on Human Rights*, 38(3–4), 215–239. <https://doi.org/10.1080/02587203.2023.2169750>
- Bornstein, M. H., & Bradley, R. H. (Ed.). (2014). *Socioeconomic Status, Parenting, and Child Development* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781410607027>
- Bowlby, J. (1979). The Bowlby-Ainsworth attachment theory. *Behavioral and Brain Sciences*, 2(4), 637–638. <https://doi.org/10.1017/S0140525X00064955>
- Bronfenbrenner, U. (1979). Contexts of child rearing: Problems and prospects. *American Psychologist*, 34(10), 844–850. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.844>
- Byrne, B., & Lundy, L. (2019). Children's rights-based childhood policy: A six-P framework. *The International Journal of Human Rights*, 23(3), 357–373. <https://doi.org/10.1080/13642987.2018.1558977>
- Cassidy, J., Poehlmann, J., & Shaver, P. R. (2010). An attachment perspective on incarcerated parents and their children. *Attachment & Human Development*, 12(4), 285–288. <https://doi.org/10.1080/14616730903417110>
- Chao, R. K. (1994). Beyond Parental Control and Authoritarian Parenting Style: Understanding Chinese Parenting Through the Cultural Notion of Training. *Child Development*, 65(4), 1111. <https://doi.org/10.2307/1131308>
- Connolly, N., & Devaney, C. (2018). Parenting Support: Policy and Practice in the Irish Context. *Child Care in Practice*, 24(1), 15–28. <https://doi.org/10.1080/13575279.2016.1264365>
- Dockery, A. M., Koshy, P., & Li, I. W. (2022). Parental expectations of children's higher education participation in Australia. *British Educational Research Journal*, 48(4), 617–639. <https://doi.org/10.1002/berj.3786>
- Eklund, L., & Lundqvist, Å. (2021). Children's rights and gender equality in Swedish parenting support: Policy and practice. *Journal of Family Studies*, 27(1), 32–47. <https://doi.org/10.1080/13229400.2018.1484379>
- Esping-Andersen, G. (2021). *The incomplete revolution: Adapting to women's new roles* (Repr). Polity Press.
- Freeman, M., & Saunders, B. J. (2014). Can we Conquer Child Abuse if we don't Outlaw Physical Chastisement of Children? *The International Journal of Children's Rights*, 22(4), 681–709. <https://doi.org/10.1163/15718182-02204002>
- Greenhalgh, T., Thorne, S., & Malterud, K. (2018). Time to challenge the spurious hierarchy of systematic over narrative reviews? *European Journal of Clinical Investigation*, 48(6), e12931. <https://doi.org/10.1111/eci.12931>

- Grolnick, W. S., & Pomerantz, E. M. (2009). Issues and Challenges in Studying Parental Control: Toward a New Conceptualization. *Child Development Perspectives*, 3(3), 165–170. <https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2009.00099.x>
- Hart, P. F., & Rodgers, W. (2024). Competition, competitiveness, and competitive advantage in higher education institutions: A systematic literature review. *Studies in Higher Education*, 49(11), 2153–2177. <https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2293926>
- Heckman, J. J. (2006). Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children. *Science*, 312(5782), 1900–1902. <https://doi.org/10.1126/science.1128898>
- Holloway, D. J., Green, L., & Stevenson, K. (2015). Digitods: Toddlers, Touch Screens and Australian Family Life. *M/C Journal*, 18(5). <https://doi.org/10.5204/mcj.1024>
- Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Key, A. G. (2015). Parenting Time in Texas Child Support Cases. *Family Court Review*, 53(2), 258–266. <https://doi.org/10.1111/fcre.12143>
- Kobakhidze, M. N., Ma (马莹), Y., & Tsaloukidis, A. (2024). Tiger Parenting Beyond Cultural Essentialism: Discourses of Class, Culture, and Competition in Hong Kong. *ECNU Review of Education*, 7(3), 531–553. <https://doi.org/10.1177/20965311231198252>
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Kumar, D. (2023). Development of Gender Roles in Children Through Child-Rearing Techniques by Parents. Dalam T. Chakraborty, N. Mishra, A. Natarajan, & B. Chatterjee, *Gender Equality from a Modern Perspective* (1 ed., hlm. 41–52). Apple Academic Press. <https://doi.org/10.1201/9781003377979-3>
- Lansdown, G. (2012). *A handbook of children and young people's participation: Perspectives from theory and practice* (B. Percy-Smith & N. Thomas, Ed.; Reprinted). Routledge.
- Lee, Y.-J., & Chen, H. (2018). Empowerment or alienation: Chinese and Korean immigrant mothers' perception of mobile media in constructing their social role and facilitating parenting practices in the US. *Mobile Media & Communication*, 6(3), 390–406. <https://doi.org/10.1177/2050157918763981>
- Liu, S., & Wang, H. (2024). Chinese People's Child Bearing and Rearing Beliefs: The Interplay Between Confucianism and Neoliberalism. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 55(6), 638–658. <https://doi.org/10.1177/00220221241248596>
- Lundy, L. (2007). 'Voice' is not enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. *British Educational Research Journal*, 33(6), 927–942. <https://doi.org/10.1080/01411920701657033>
- MaPa. (2022). *Parenting for Lifelong Health (PLH) – Masayang Pamilya (MaPa) Evaluation Study*. Masayang Pamilya (MaPa). <https://www.spi.ox.ac.uk/parenting-for-lifelong-health-philippines>
- McBrien, J. L. (2011). The importance of context: Vietnamese, Somali, and Iranian refugee mothers discuss their resettled lives and involvement in their children's schools. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 41(1), 75–90. <https://doi.org/10.1080/03057925.2010.523168>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & for the PRISMA Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *BMJ*, 339(jul21 1), b2535–b2535. <https://doi.org/10.1136/bmj.b2535>
- OECD. (2020). *Building a High-Quality Early Childhood Education and Care Workforce: Further Results from the Starting Strong Survey 2018*. OECD. <https://doi.org/10.1787/b90bba3d-en>
- OECD. (2023). *Equity, diversity and inclusion in early childhood education and care*. OECD. <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/11/equi>

[ty-diversity-and-inclusion-in-early-childhood-education-and-care 29f85f1a/72ab31c1-en.pdf](https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i1.6870)

- Ogburn, W. F., & Thomas, D. S. (1922). The Influence of the Business Cycle on Certain Social Conditions. *Journal of the American Statistical Association*, 18(139), 324–340. <https://doi.org/10.1080/01621459.1922.10502475>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pillay, J. (2018). Early Education of orphans and vulnerable children: A crucial aspect for social justice and African development. *Koers - Bulletin for Christian Scholarship*, 83(1), 2335. <https://doi.org/10.19108/KOERS.83.1.2335>
- Riádigos-Couso, X., García-Vinuesa, A., & Gradaílle, R. (2025). Citizen participation of childhood and adolescence in local government: A systematic review. *Children and Youth Services Review*, 170, 108141. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2025.108141>
- Salminen, J. (2017). Early Childhood Education and Care System in Finland. *Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne*, 5(2), 135–154. <https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.09>
- Salonen, A. M., & Koivisto, T. H. (2024). The Impact of Childcare Benefits on Family Role Dynamics of Working Women in Finland. *Studies in Social Science & Humanities*, 3(11), 8–14. <https://doi.org/10.56397/SSSH.2024.11.02>
- Save the Children. (2023a). *Guaranteeing Children's Future*. Save the Children. <https://www.savethechildren.org.nz/assets/Files/Reports/Guaranteeing-Childrens-Future-Report-Full-MARCH-2023.pdf>
- Save the Children. (2023b). *What About Children*. Save the Children. <https://www.savethechildren.org.uk/content/dam/gb/reports/sept-23-scuk-what-about-children-covid.pdf>
- Scholes, L., Wallace, E., Walker, S., Lunn Brownlee, J., & Lawson, V. (2022). Children's epistemic reasoning about social inclusion of aggressive peers in a culturally diverse school. *British Educational Research Journal*, 48(2), 272–291. <https://doi.org/10.1002/berj.3766>
- Shonkoff, J. P., & Phillips, D. A. (2000). *From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development* (hlm. 9824). National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/9824>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Solin, R. S. U., & Ruwaida, I. (2022). Reflection on the Implementation of Childr Reflection on the Implementation of Children's Participation Rights (Based on L Rights (Based on Lundy's Participation Model) ticipation Model). *Journal of Statistic& Global Studies*. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1088&context=jsgs>
- Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., & Taggart, B. (2011). Pre-school quality and educational outcomes at age 11: Low quality has little benefit. *Journal of Early Childhood Research*, 9(2), 109–124. <https://doi.org/10.1177/1476718X10387900>
- Taylor, J., Majeed, T., Remond, M., Bagade, T., Edwards, L., & Sullivan, E. (2024). Are custodial-based mothers and children's units evaluated, effective and aligned with a human rights-based approach? – A systematic review of the evidence. *eClinicalMedicine*, 69, 102496. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2024.102496>
- Tello, B., Mendoza-Gordillo, M. J., Moreano, M., Bates, B. R., Quinn, K., Rogel, C., & Grijalva, M. J. (2024). Nurturing care: Perceptions and practices of caregivers for children under five in the Ecuadorian highlands – a qualitative study. *Frontiers in Public Health*, 12, 1373896. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1373896>

- Teuber, Z., Grüter, S., Wang, Q., Bobrowicz, K., Su, Y., & Greiff, S. (2024). The Joys and Sorrows of Parenting: Parental Burnout and Parental Involvement in Chinese and German Parents From a Demands-Resources Perspective. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 55(1), 47–73. <https://doi.org/10.1177/00220221231202731>
- Tobin, J. (Ed.). (2019). *The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary* (1 ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780198262657.001.0001>
- UNESCO. (2023). *Inclusive early childhood care and education: From commitment to action*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378076>
- UNICEF. (2019). *Promoting Positive Parenting Lessons from programmes in East Asia and the Pacific – Case Studies*. Unicef. https://support-parents.org/wp-content/uploads/2023/05/unicef_eapro_-_Parenting-Case-Studies-221119.pdf
- UNICEF. (2020). *The State of Children in Indonesia*. Unicef. <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-06/The-State-of-Children-in-Indonesia-2020.pdf>
- UNICEF. (2023). *Early Childhood Development UNICEF Vision for Every Child*. Unicef. https://www.unicef.org/media/145336/file/Early_Childhood_Development_-_UNICEF_Vision_for_Every_Child.pdf
- UNICEF. (2024a). *Early childhood education*. Unicef. <https://data.unicef.org/topic/early-childhood-development/early-childhood-education/>
- UNICEF. (2024b). *The State of the World's Children 2024: The future of childhood in a changing world*. Unicef. <https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children/2024>
- Van IJzendoorn, M. H., Bakermans-Kranenburg, M. J., Duschinsky, R., Fox, N. A., Goldman, P. S., Gunnar, M. R., Johnson, D. E., Nelson, C. A., Reijman, S., Skinner, G. C. M., Zeanah, C. H., & Sonuga-Barke, E. J. S. (2020). Institutionalisation and deinstitutionalisation of children 1: A systematic and integrative review of evidence regarding effects on development. *The Lancet Psychiatry*, 7(8), 703–720. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(19\)30399-2](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(19)30399-2)
- WHO. (2025). *Female genital mutilation*. WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>
- World Bank. (2024). *A BETTER BANK FOR A BETTER WORLD ANNUAL REPORT 2024*. <https://www.worldbank.org/en/about/annual-report#anchor-annual>
- Zaidi, R., Oliver, C., Strong, T., & Alwarraq, H. (2021). Behind Successful Refugee Parental Engagement: The Barriers and Challenges. *Canadian Journal of Education/Revue canadienne de l'éducation*, 44(4), 907–937. <https://doi.org/10.53967/cje-rce.v44i4.4537>
- Zhang, W. (2020). Shadow education in the service of tiger parenting: Strategies used by middle-class families in China. *European Journal of Education*, 55(3), 388–404. <https://doi.org/10.1111/ejed.12414>